DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 5 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

DAMPAK KEBIJAKAN REVITALISASI KOTA LAMA SURABAYA TERHADAP UMKM DI SEKITARNYA

Yasmin Alissa Salsabella[1], Silmah Salsabilla Indriani[2], Rosdiana Tasman[3], Bagus Nuari Harmawan[4]
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur[1234]
22041010015@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the revitalization policy of the Old Town area in Surabaya on the surrounding Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The revitalization was carried out as part of the Surabaya City Government's efforts to preserve cultural heritage sites while simultaneously strengthening the local economy through tourism-based development. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation involving MSME actors, visitors, and relevant government officials. The study applies the policy impact theory by Thomas R. Dye. The findings indicate that the revitalization has had a positive impact, including increased MSME turnover, the emergence of new business opportunities, and a rise in tourist visits. However, there are also challenges, such as indirect costs borne by non-assisted MSMEs, including rental and other operational expenses. This policy also generates positive externalities for supporting sectors such as photography services, transportation, and accommodation. In the long term, the revitalization of Surabaya's Old Town holds potential to drive sustainable economic growth, provided that MSME management and empowerment are conducted in an inclusive and equitable manner.

Keyword: *Revitalization, MSMEs, Surabaya Old Town, Public Policy, Local Economy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan revitalisasi kawasan Kota Lama Surabaya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya. Revitalisasi dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam pelestarian kawasan cagar budaya sekaligus penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM, pengunjung, serta pihak pemerintah terkait. Penelitian ini menggunakan teori dampak kebijakan oleh Thomas R. Dye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet UMKM, terbukanya peluang usaha baru, serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Namun, terdapat pula tantangan berupa biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh UMKM non-binaan seperti sewa tempat dan biaya operasional lainnya. Kebijakan ini juga menciptakan eksternalitas positif terhadap sektor-sektor pendukung seperti

jasa fotografi, transportasi, dan akomodasi. Dalam jangka panjang, revitalisasi Kota Lama Surabaya memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan apabila pengelolaan dan pemberdayaan UMKM dilakukan secara merata dan inklusif.
Kata Kunci: Revitalisasi, UMKM, Kota Lama Surabaya, Kebijakan Publik, Ekonomi Lokal

PENDAHULUAN

Kota Surabaya dikenal dengan "Kota Pahlawan" identitas ini dilandasi oleh SK Penetapan Pemerintah No. 9/UM/1946 karena perannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan ragam wisata bersejarah, kekayaan budaya, dan hiburan. Salah satunya adalah Wisata Kota Lama Surabaya, terbagi menjadi empat zona utama, yaitu Eropa, Pecinan, Arab, dan Melayu, yang pada masa lalu berperan sebagai pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 16 bahwa revitalisasi adalah mengubah bangunan dan lingkungan cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk fungsi yang lebih sesuai tanpa menuntut perubahan drastis. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang menekankan pentingnya menjaga nilai sejarah dan budaya dari bangunan dan kawasan bersejarah.

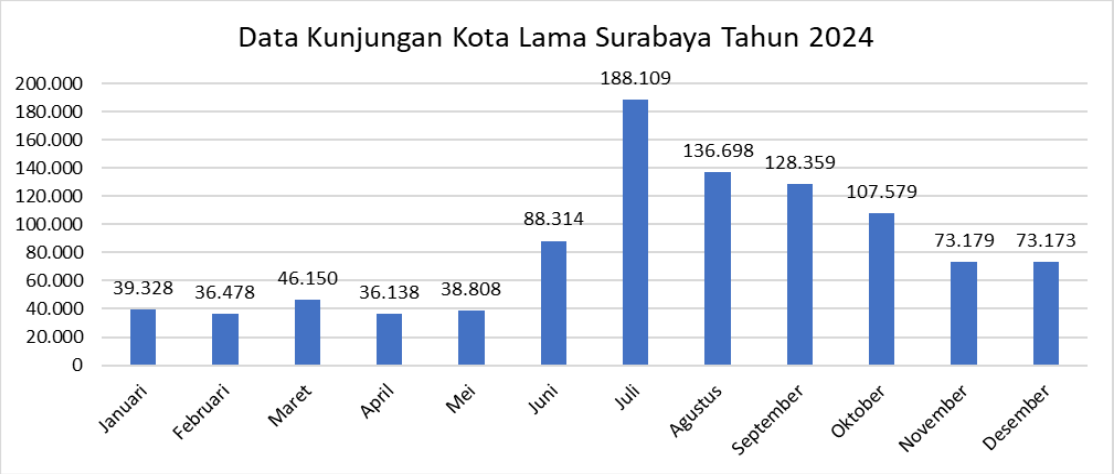
Revitalisasi dilakukan agar kawasan Kota Lama Surabaya kembali lebih hidup, dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar terutama bagi pelaku UMKM yang telah lama menjadi bagian dari ekosistem bisnis di kawasan Kota Lama Surabaya. Namun, revitalisasi tidak selalu berdampak positif bagi seluruh pihak dan menimbulkan tantangan baru bagi UMKM yang sudah ada. Penelitian oleh Trifena dan Dewi (2021) mengenai revitalisasi Kota Lama Semarang, menunjukkan salah satu sisi negatif yaitu banyak UMKM mengalami penurunan kemampuan terhadap harga sewa lahan karena adanya proses revitalisasi yang menyebabkan tingkat pendapatan menurun. Di sisi lain, penelitian oleh Angelika et al. (2024) mengenai revitalisasi Alun-Alun Dadaha di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa revitalisasi kawasan ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM di sekitarnya.

Penelitian ini memiliki keterbaruan karena secara khusus mengkaji dampak revitalisasi kawasan Kota Lama Surabaya terhadap perkembangan UMKM lokal di sekitarnya, yang sebelumnya belum banyak diteliti secara mendalam. Dengan pendekatan studi kasus terkini pasca-revitalisasi, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara program pelestarian kawasan heritage dan dinamika ekonomi mikro di lingkungan

sekitarnya. Kenaikan jumlah wisatawan membuka peluang signifikan bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar. Kuliner khas serta produk antik dan unik berpotensi menarik minat wisatawan. Dukungan aktif pemerintah melalui bantuan modal, pelatihan, pengembangan usaha, dan penyediaan lokasi strategis yang terjangkau di Kota Lama Surabaya sangat diharapkan agar UMKM dapat bertahan dan berkembang seiring revitalisasi. Hal ini penting untuk memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh investor, tetapi juga memberikan ruang bagi pertumbuhan UMKM, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan biaya sewa tempat usaha.

Gambar 1. Data Kunjungan Kota Lama Surabata Tahun 2024

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, 2024



Berdasarkan data diatas, jumlah pengunjung pada bulan Juli meningkat drastis dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yakni mencapai 188.109 orang. Lonjakan ini sejalan dengan *Grand Launching* Kota Lama Surabaya yang digelar pada 3 Juli 2024 oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dampaknya masih terasa pada bulan Agustus dengan jumlah pengunjung mencapai 136.698 orang, dan 128.359 orang pada bulan September yang menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perubahan yang terjadi di Kota Lama Surabaya.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam (Siti Marwiyah, 2022) mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)". Adapun menurut (Anggara, 2014), kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berhubungan dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Dalam bukunya, sistem kebijakan publik terdiri dari tiga elemen utama. Pertama, lingkungan kebijakan (*policy environment*) yaitu faktor yang melatarbelakangi munculnya isu di masyarakat dan memengaruhi pihak yang terlibat. Kedua, kebijakan publik (*public policies*) yaitu keputusan yang dirancang oleh berbagai instansi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ketiga, pelaku kebijakan (*policy stakeholder*s) yaitu individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat dalam proses kebijakan, baik sebagai pengambil keputusan maupun pihak yang terdampak. Pada dasarnya, kebijakan publik dirancang untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat, yang sejak awal telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan sebuah proses penerapan terkait suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan adalah langkah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut agar tepat mencapai sasaran. Untuk melaksanakan kebijakan publik, dapat dilakukan secara langsung melalui program atau perumusan kebijakan dari turunan kebijakan tersebut. Dalam proses implementasi kebijakan inilah akan terlihat konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari implementasi kebijakan. Dampak ini dapat mempengaruhi individu maupun kelompok sasaran secara langsung maupun tidak langsung kepada kelompok yang bukan menjadi target, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Pramono, 2020). Menurut Thomas R. Dye dalam karyanya yang berjudul *Understanding Public Policy,* implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting setelah kebijakan dirumuskan dan disahkan. Implementasi menjadi proses di mana kebijakan dijalankan oleh lembaga-lembaga administratif, melalui pengaturan program, anggaran, dan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Thomas R. Dye menekankan bahwa tidak semua kebijakan yang sudah

dirumuskan akan berhasil diimplementasikan karena adanya kendala politik, birokrasi, koordinasi antar lembaga, dan resistensi dari masyarakat.

Dampak Kebijakan Publik

Teori dampak kebijakan publik oleh Thomas R. Dye dalam (Zakirin & Arifin, 2022), dijelaskan bahwa setiap formulasi kebijakan publik tidak luput dari konsekuensi yang ditimbulkan. Dalam pandangan Thomas R. Dye mengemukakan beberapa dimensi dampak kebijakan publik, yakni:

1. Dampak kebijakan yang diharapkan atau yang tidak diharapkan terhadap permasalahan publik hingga mempengaruhi sasaran yaitu kelompok maupun individu yang terlibat dalam implementasinya.
2. Dampak kebijakan eksternalitas atau diluar dari sasaran primer yang meluas dari tujuan utama kebijakan. Eksternalitas ini dapat bersifat positif maupun negatif.
3. Dampak kebijakan terhadap situasi terkini dan di masa mendatang. Contohnya, kebijakan penyesuaian harga BBM yang tujuannya untuk mengatasi defisit anggaran negara saat ini, namun berpotensi mempengaruhi perilaku konsumsi energi masyarakat di masa mendatang.
4. Dampak kebijakan pada aspek finansial, termasuk biaya pengeluaran langsung untuk pembiayaan implementasi program kebijakan publik.
5. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung yang tidak secara eksplisit termasuk dalam anggaran, dan ditanggung oleh masyarakat atau kelompok tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang akan dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan data yang berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami secara mendalam mengenai dampak revitalisasi Kota Lama Surabaya terhadap UMKM di sekitarnya. Penelitian kualitatif berupaya memahami, mendalami, dan mengeksplorasi suatu fenomena secara komprehensif. Hasil penelitian akan diinterpretasikan dan disimpulkan sesuai dengan konteks yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif dan alami, meskipun tetap mengandung unsur subjektivitas (Nursapia Harahap, 2020). Penelitian ini dilakukan di kawasan Kota Lama Surabaya karena

kawasan ini mengalami revitalisasi yang berdampak langsung pada lingkungan sekitar, termasuk UMKM. Lokasi ini dipilih karena adanya potensi perubahan dalam dinamika ekonomi dan sosial akibat revitalisasi, sehingga memungkinkan penelitian menggali lebih dalam dampaknya terhadap pelaku usaha kecil.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang melibatkan pihak terkait, yakni pelaku UMKM dan pengunjung, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM, pengunjung, serta pihak pemerintah yang terkait dengan program revitalisasi Kota Lama Surabaya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari data resmi dan laporan dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara tatap muka dengan pelaku UMKM sebanyak 5-10 orang, pengunjung wisata Kota Lama Surabaya, Staff Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya, serta Ketua Tim Kerja Bidang Pariwisata Kota Surabaya. Adapun observasi yang dilakukan secara langsung di kawasan Kota Lama Surabaya untuk melihat aktivitas ekonomi UMKM sebelum dan setelah revitalisasi. Observasi ini mencakup perubahan jumlah pengunjung, pola konsumsi, serta interaksi antara pelaku UMKM dan wisatawan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dalam bentuk foto aktivitas UMKM. Selanjutnya, hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif mulai dari proses reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan revitalisasi kawasan Kota Lama Surabaya merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota Surabaya dalam menghidupkan kembali nilai historis kawasan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, khususnya pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa salah satu sasaran pelestarian adalah memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan potensi bangunan cagar budaya, demi

kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan revitalisasi kawasan Kota Lama Surabaya tidak hanya bertujuan memperindah ruang kota atau melestarikan bangunan bersejarah, tetapi juga dimaksudkan untuk membuka peluang baru bagi penguatan ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan secara langsung di kawasan Kota Lama Surabaya, ditemukan sejumlah dampak yang dirasakan khususnya bagi pelaku UMKM sekitar area revitalisasi. Dengan pemahaman lebih mendalam sebagaimana menggunakan teori dampak Kebijakan Thomas R. Dye yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan administratif suatu kebijakan terhadap masyarakat. Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM menunjukkan bahwa dengan adanya revitalisasi di kawasan Kota Lama Surabaya ini berdampak signifikan bagi ekonomi masyarakat. Dari hasil wawancara dengan para pelaku UMKM di kawasan Kota Lama Surabaya setelah adanya revitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bahwa omzet harian yang didapatkan meningkat, walaupun dengan nominal yang berbeda-beda. Maka, hal ini menandakan adanya dampak ekonomi bagi UMKM sekitar dari implementasi kebijakan revitalisasi. Kebijakan Revitalisasi Kota Lama Surabaya ini berdampak pada dimensi sebagaimana dengan teori dampak kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, sebagai berikut:

Dampak Kebijakan Terhadap Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan ini menghidupkan kembali aktivitas ekonomi lokal. Wajah baru kawasan ini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun luar daerah, dengan suasana baru dan lebih menarik sehingga nyaman untuk dikunjungi. Bagi masyarakat sekitar merasakan dampak positif ekonomi karena mendapatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan dan peluang usaha lebih luas sebagai pelaku UMKM. Program pemberdayaan UMKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya turut memperkuat dampak kebijakan ini. Dengan pelatihan, pendampingan, penyediaan ruang usaha, program ini mendukung secara nyata keberlangsungan UMKM di kawasan Kota Lama. Adapun data kunjungan wisatawan yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, bahwa setelah revitalisasi Kota Lama Surabaya diresmikan pada bulan Juli 2024 meningkat drastis, hingga pada bulan Desember 2024 sedikit menurun, namun masih terlihat antusiasme

Vol. 5 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

masyarakat berkunjung ke Kota Lama Surabaya, berbeda dengan jumlah kunjungan sebelum peresmian.

Peningkatan omzet yang dialami oleh pelaku UMKM karena jumlah kunjungan wisatawan yang datang. Berikut ini adalah pernyataan dari Ibu Firda selaku salah satu pelaku UMKM:

> "*Pendapatan kotor perhari dari jualan es-es, makanan ringan kayak dimsum, kentang goreng itu bisa sampai 5 juta rupiah. Itu hari biasa (senin-jumat), kalau sabtu minggu ya bisa diatas lima juta. Jadi per minggu kurang lebih 35 juta".*

Pernyataan berikutnya, datang dari oleh Ibu Novi selaku warga sekitar yang berjualan dari jendela rumahnya:

> "*Waktu awal peresmian itu ramai ya, lumayan saya cuma jualan es dari jendela gini aja setiap harinya bisa dapat lima ratus ribu. Sekarang agak menurun jadi sehari kadang dapatnya seratus ribu".*

Dampak Kebijakan Terhadap Kelompok-Kelompok di Luar Sasaran (Eksternalitas)

Dampak kebijakan revitalisasi kawasan Kota Lama Surabaya tidak hanya dirasakan oleh kelompok sasaran utama yaitu pelaku UMKM, tetapi juga menghasilkan eksternalitas positif yang signifikan terhadap kelompok-kelompok di luar sasaran kebijakan. Kebijakan revitalisasi yang bertujuan menghidupkan kembali fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kawasan heritage, turut membuka peluang ekonomi baru bagi sektor-sektor pendukung yang sebelumnya tidak menjadi fokus utama. Misalnya, meningkatnya permintaan terhadap jasa fotografi, termasuk street photographer yang menawarkan dokumentasi artistik di ruang-ruang publik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Adi selaku fotografer di kawasan Kota Lama Surabaya dalam wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

> *"Saya disini sudah lama sejak sebelum revitalisasi. Lebih ramai sekarang ini setelah revitalisasi. Penghasilan juga ikut naik, tergantung seberapa banyak orang yang datang".*

Lebih lanjut, pelaku usaha informal lainnya seperti pedagang bunga juga turut merasakan manfaat dari revitalisasi kawasan. Ibu Yanti, yang berjualan bunga sekitar lokasi revitalisasi, menuturkan bahwa terjadi peningkatan penghasilan yang cukup signifikan.

"Dulu waktu baru revitalisasi, penghasilan saya lumayan. Pernah sampai tujuh ratus ribu".

Selain itu, sektor akomodasi juga merasakan dampak dari kebijakan ini. Sektor transportasi lokal turut terpengaruh, dengan moda transportasi tradisional seperti becak dan andong yang kembali diminati oleh wisatawan. Moda transportasi modern seperti skuter listrik, sepeda sewa, dan kendaraan ramah lingkungan lainnya juga semakin populer. Para penyedia jasa transportasi ini merasakan peningkatan pendapatan setelah revitalisasi. Tidak hanya itu, jasa parkir turut merasakan dampak positif. Peningkatan jumlah kendaraan yang mengunjungi kawasan tersebut berkontribusi pada meningkatnya permintaan terhadap layanan parkir yang memberikan tambahan pendapatan bagi penyedia jasa parkir di sekitar area tersebut.

Dampak Kebijakan Terhadap Situasi Terkini dan di Masa Mendatang

Dampak kebijakan revitalisasi ini tidak hanya terlihat saat ini, tapi juga dalam jangka panjang yang harus tetap dikelola. Revitalisasi Kota Lama berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengembangan sektor pariwisata yang inklusif. Dampak Revitalisasi Kota Lama pada situasi saat ini (jangka pendek) dapat dilihat bahwa kebijakan ini meningkatkan aktivitas ekonomi langsung di sekitar kawasan Kota Lama. Menurut data Disbudporapar Kota Surabaya, selama revitalisasi berlangsung, terdapat 42 usaha yang terbentuk. Para pedagang di kawasan Kota Lama menyerukan bahwa hanya sedikit orang yang membeli dagangannya sebelum adanya revitalisasi, namun setelah adanya revitalisasi, pendapatannya naik drastis. Perubahan akan lingkungan Kota Lama juga terasa, kawasan yang sebelumnya gelap dan rawan kriminal berubah menjadi destinasi wisata yang aman dan tertata. Fasilitas seperti pencahayaan jalan dan stan khusus UMKM mendukung aktivitas usaha. Dampak pada masa mendatang (jangka panjang) dapat menjadi potensi pertumbuhan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Revitalisasi dapat menjadikan Kota Lama sebagai pusat ekonomi kreatif berbasis sejarah. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya terus melakukan kolaborasi dengan dinas lain untuk terus menghidupkan kawasan wisata Kota Lama, Disbudporapar Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya untuk pelaku usaha di kawasan Kota Lama.

Dampak Kebijakan pada Aspek Finansial

Dalam Revitalisasi Kota Lama Surabaya memperhitungkan biaya langsung (pengeluaran pemerintah) dan dampak finansial yang timbul untuk pembiayaan implementasi program kebijakan. Pada tahun 2023, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan menyampaikan bahwa 5000 pelaku UMKM telah mendapatkan bantuan permodalan dalam rangka memperkuat sektor ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran (Wildan Pratama, 2023). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa upaya revitalisasi kawasan kota tua akan mencakup Kampung Melayu, Kampung Arab, dan Kampung Pecinan. Ketiga wilayah tersebut direncanakan akan diintegrasikan dalam satu kesatuan kawasan guna mendukung pengembangan wisata berbasis heritage. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan 10 Miliar Rupiah (Amir Baihaqi, 2018).

Sebagai bagian dari upaya mendukung UMKM di kawasan Kota Lama, pemerintah turut memberikan bantuan fasilitas berupa atap *(galvalum)* dan pagar untuk usaha warung. Keberadaan fasilitas tersebut berkontribusi dalam menciptakan ruang usaha yang lebih tertata dan nyaman bagi pelaku usaha lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengeluarkan biaya langsung untuk mendukung pelaksanaan program bagi UMKM. Bantuan ini membantu pelaku usaha agar tetap dapat beroperasi dengan baik selama proses revitalisasi berlangsung. Kebijakan ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik kawasan, tetapi juga mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM di sekitarnya sehingga revitalisasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi ekonomi lokal.

Dampak Kebijakan Terhadap Biaya Tidak Langsung

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha tidak menanggung biaya ini secara merata. UMKM binaan, yang telah terdaftar terbebas dari keharusan membayar biaya karena telah mendapatkan fasilitas dan subsidi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Berbeda dengan UMKM non-binaan yang harus membayar biaya sewa tempat yang bervariasi tergantung letak strategisnya, mereka secara mandiri membayar tanpa bantuan dari Dinas terkait. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara beberapa UMKM non-binaan, bahwa terdapat salah satu tarif sewa tempat di teras rumah pribadi ditetapkan sekitar Rp.1.700.000,00 perbulan. Sehingga mereka sangat mengandalkan

pendapatan harian untuk menutup biaya operasional termasuk sewa tempat, bahan baku, hingga kebutuhan usaha lainnya. Selain itu, diperoleh pernyataan dari Ibu Kholifah yang telah berjualan sejak lama sebagai berikut:

> *"Kalau yang sebaris penjual di bagian sini sudah berjualan sekitar 8 tahun, itu ditarik uang kebersihan atau uang sampah. Sedangkan bantuan dana tidak ada, kita cuma dipasangkan atap (galvalum) sama pagar setengah ini".*

Hal ini menunjukkan bahwa adanya beban biaya tidak langsung tersendiri khususnya bagi UMKM non-binaan. Ketimpangan ini menjadi kesenjangan daya tahan usaha, yang mana UMKM non-binaan rentan terhadap biaya yang fluktuatif. Adapun pengenaan tarif pajak bagi UMKM binaan untuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5% agar tetap berkontribusi terhadap PDB, mengingat bahwa peran UMKM berkontribusi besar di sektor perekonomian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan revitalisasi Kota Lama Surabaya secara langsung berdampak signifikan, terutama bagi UMKM sekitar. Revitalisasi kawasan ini membuka peluang untuk kembali menghidupkan aktivitas ekonomi lokal. Dengan suasana yang baru, banyak wisatawan lokal hingga luar daerah yang berkunjung dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Selain itu, dukungan dari pemerintah bagi UMKM binaan dan non-binaan seperti penyediaan tempat usaha yang layak, bantuan modal, dan pelatihan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Namun dari hasil wawancara dengan pelaku usaha, Kota Lama Surabaya dalam beberapa waktu terakhir, kawasan ini kembali mengalami penurunan aktivitas ekonomi dan menjadi sepi, yang berdampak pada menurunnya pendapatan UMKM setempat. Dinas Kepariwisataan Surabaya, melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi menurunnya jumlah wisatawan di kawasan Kota Lama. Salah satunya adalah mendorong kolaborasi dengan komunitas, asosiasi bisnis, dan investor untuk menciptakan promosi, event, serta menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan budaya di kawasan Kota Lama.

DAFTAR PUSTAKA

Angelika, S. T., Fadjarajani, S., & Darmawan, C. (2024). Pengaruh Revitalisasi Alun-Alun Dadaha Terhadap Pertumbuhan Sosial Ekonomi Wilayah Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Ips*, *2*(4), 50–55. Https://Doi.Org/10.62383/Sosial.V2i4.456

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.

Ermawati, Y., Sodikin, M., & Supeni, E. (2022). *Strategi Pemberdayaan Umkm Berbasis Sentra Wisata Kuliner Di Surabaya*. *2*(2).

Kusumtuti, B. S. (2024). Analisis Dampak Revitalisasi Jalan Tunjungan Terhadap Pendapatan Dan Perkembangan Umkm Di Wilayah Jalan Tunjungan Surabaya. *Oeconomicus Journal Of Economics*, *8*(2).

Mafalsa, A. F., Hamid, D., & Sunarti. (2016). Analisis Dampak Revitalisasi Alun-Alun Kota Malang Dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata. In *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)|Vol* (Vol. 37, Issue 1).

Nursapia Harahap. (2020). *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif* (Hasan Sazali, Ed.). Wal Ashri Publishing.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya. (2005).

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. Https://Doi.Org/10.1109/Icmens.2005.96

Siti Marwiyah. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.

Sonaesti, C., & Purwanto, E. (2020). *Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang: Antara Harapan Dan Kenyataan*.

Thomas R. Dye. (1992). *Understanding Public Policy*.

Trifena, L. J., Dewi, S. P., & Johan, L. (2021). Pengaruh Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota*, *10*(4), 260–271. Http://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Pwk

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan). *JAPB*, *5*(1).

Wildan Pratama. (2023, June 22). Targetkan 450 Miliar Bantuan Permodalan untuk UMKM di Jatim. *Suarasurabaya.Net*.